

ANALISIS PROGRAM INFRASTRUKTUR KOTA MALANG (TINJAUAN *VALUE FOR MONEY*)

¹Damas Dwi Anggoro, ²Ima Kumalasari, ³Durratun Nashihah

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: imakumala18@gmail.com

Abstrak: Infrastruktur kota menjadi dasar penunjang untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Perencanaan ruang yang terkendali dan terkoordinir dengan baik memberikan kualitas ruang yang memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat. Setidaknya dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang besar, masih menyisakan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang berdasarkan tinjauan *Value for Money* dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus namun untuk memperdalam permasalahan maka analisis data yang digunakan mengacu pada konsep *Value for Money*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil pengukuran kinerja dari sisi ekonomis menunjukkan keseluruhan program menunjukkan hasil yang ekonomis, yang ditandai dengan terlaksananya penghematan pada masing-masing program; (2) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efisiensi menunjukkan hasil yang efisien, walaupun terdapat 3 program yang meliputi program yang tingkat outputnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak menjadi hambatan untuk mencapai tingkat efisiensinya (3) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efektifitas menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat 3 indikator capaian hasil yang dapat dikatakan efektif, yang mana menjadi menarik ketika dilakukan pengukuran namun ketujuh program tidak mencapai sasaran efektivitas.

Kata kunci: Perencanaan Tata Ruang, Pengukuran Kinerja, *Value for Money*

Abstract: *Infrastructure is the basis for supporting people's mobility. Well controlled and well coordinated spatial planning provides a quality sphere that has an impact on prosperity for the community. At least from the programs that have been implemented with a high cost still causes a few problems. This study aims to analyze the performance measurement of the Public Works, Spatial Planning, Housing and Settlement Areas of Malang City based on a Value for Money that consist of economy, efficiency, and effectiveness measurement. The research method uses a qualitative approach in case study research, but to deepen the problem cases, the data analysis used the concept of Value for Money. The findings of the study show that (1) The economic performance measurement show that the entire program shows to be an economic, which is indicated by the implementation of savings in each program; (2) The efficiency performance measurement shows to be efficient, in spite of the fact that there are 3 programs whose the output indicators are not in accordance with the set targets, but this is not being an obstacle to achieving the efficiency (3) The effectiveness performance measurement shows that there are only 3 indicators that can be said to be effective, the interesting finding is the seven programs do not reach the target of effectiveness.*

Keywords: *Spatial Planning, Performance Measurement, Value for Money*

PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang menjadi sebuah kebijakan yang secara berkelanjutan mempengaruhi pembangunan dalam suatu kota atau daerah. Perencanaan tata ruang yang baik memberikan dampak kemakmuran yang sebesar-besarnya pada masyarakat secara berkesinambungan (Budihardjo,

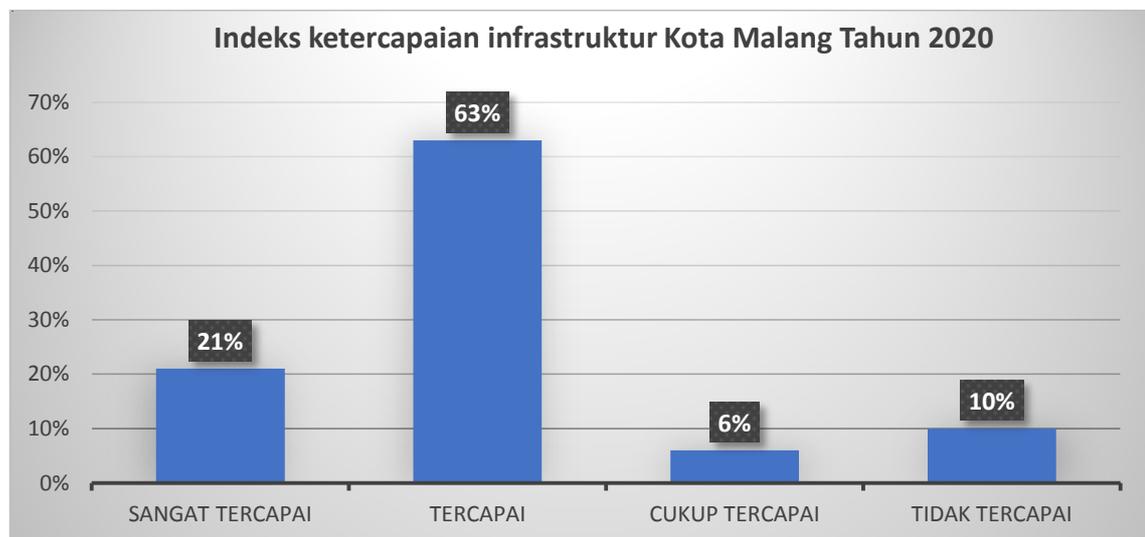
1997; Tarigan 2005; Adianti; 2020). Selain itu sebagai pengatur kualitas ruang pada daerah perkotaan diperlukan perencanaan tata ruang yang sesuai dengan potensi dan juga sebagai pengendali pertumbuhan maupun perkembangan kota agar sesuai dengan daya dukungnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang tata ruang yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan tata ruang tidak hanya sekedar proses penataan tata ruang wilayah namun basis yang digunakan mengacu pada pengembangan program yang inovatif dan kreatif.

Selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembinaan konstruksi oleh pemerintah daerah di Kabupaten/Kota turut menjelaskan bahwa setiap kegiatan konstruksi diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan regulasi dan mendukung kebijakan terciptanya pembangunan infrastruktur Kabupaten/Kota yang berkualitas. Lebih lanjut infrastruktur yang memadai tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif di masa mendatang. Namun pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali dan tidak terkoordinasi dengan baik justru mengundang ketidakefisienan dalam penyediaan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana kota.

Kompleksitas tata ruang pada perkotaan menjadi lebih serius dibandingkan area pedesaan, hal ini disebabkan oleh keterdesakan lahan akibat semakin padatnya jumlah penduduk. Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Malang maka kegiatan baik itu perdagangan, jasa, sarana dan prasarana di Kota Malang juga semakin meningkat. Segala bentuk kegiatan dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mendukung aktivitas masyarakat. Mengingat infrastruktur dan tata ruang memainkan peranan yang penting bagi pembangunan Kota Malang, selain pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Dari hasil dokumen *legal review* tercatat sebanyak 244 kegiatan infrastruktur dan tata ruang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 63% tercapai, 21% sangat tercapai, 10% tidak tercapai dan 6% cukup tercapai sebagaimana terlihat pada gambar 1 (LKjIP DPUPRPKP, 2020)



Gambar 1. Ketercapaian Infrastruktur berdasarkan LKjIP DPUPRPKP Tahun 2020

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan wilayah Kota Malang tahun 2010-2030, tercantum bahwasanya kawasan strategis kota malang terbagi atas 2 kawasan pembangunan yang meliputi kawasan perdagangan di sekitar pasar besar kota malang dan pembangunan sentra industri di masing-masing kecamatan di kota malang, namun dalam implementasinya terdapat penambahan zonasi yaitu kawasan budaya di sekitar kayutangan dan kawasan pedestrian untuk memaksimalkan ketercapaian infrastruktur pada beberapa titik yang telah ditentukan. Pembentukan zonasi kota Malang bertujuan untuk mengikuti pola pemukiman yang berimbang dan tidak menyebabkan munculnya degradasi. Adapun berbagai kebijakan tersebut dilakukan dalam naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

Dinas ini menjalankan beberapa fungsi dan tugas terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, sistem irigasi primer maupun sekunder, SPAM Kota Malang, sistem air limbah domestik, sistem drainase, infrastruktur pada permukiman, bangunan gedung jalanan kota dan berbagai pekerjaan umum lainnya.

Disisi lain kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang masih menyisakan problematika perkotaan dan dampak eksternalitasnya terkait dengan masalah jaringan jalan, jembatan, drainase kota, pemakaman umum, transportasi umum, terminal, pelayanan persampahan, air bersih dan lain sebagainya. Setidaknya dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang besar, masih menyisakan berbagai permasalahan di Kota Malang. Studi Kristanto et al (2018), menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dimana dimensi

lebar trotoar pada ruas jalan jalur pejalan kaki di Kota Malang cenderung kecil untuk dapat dilalui oleh pejalan kaki yang berjalan beriringan ataupun berpapasan. Selain itu Lestari (2015), dalam kajiannya menyimpulkan bahwa kondisi infrastruktur berupa pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang yang masih menyisakan permasalahan terkait pembebasan tanah sehingga kegiatan tersebut belum kunjung tuntas. Selain itu permasalahan ini diperkuat oleh kajian Tusya'dah (2017), dan Sakdiah & Rahmawati (2020), bahwasanya pada data tahun 2017 Kota Malang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh atau tidak layak huni pada 29 titik yang tersebar di Kota Malang (Purnomo & Putri, 2018); Rumagit et al 2022).

Selain itu masih kurangnya pengawasan dalam pembangunan turut mempengaruhi ketidak masimalan suatu program atau kegiatan. Agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagaimana dalam Rezky (2014); Wandari (2015); Wiguna et al (2015), bahwasanya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah dan kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Adanya pengawasan ini mampu mencegah praktek-praktek menyimpang sehingga pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

Value for Money menghendaki organisasi sektor publik untuk mampu memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Menurut Mardiasmo (2018), *Value for Money* (VfM) menjadi indikator yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apakah anggaran pemerintah Kota Malang dalam program tertentu dapat menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Value for Money menjadi salah satu sistem pengukuran kinerja yang objektif, lengkap, representative dan aplikatif sehingga dianggap dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dalam mencapai pengukuran kinerja yang baik sehingga tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tentu tidak terlepas dari adanya pengawasan dan alat penunjangnya (Purnomo & Putri, 2018). Hal senada dijelaskan oleh Rumagit et al (2022) yang menyampaikan bahwa *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah secara bersama-sama dinilai dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Indikator ekonomis merupakan ukuran relatif yang mana perolehan sumber daya tertentu pada penggunaan anggaran seminimal mungkin, dengan artian bahwa peninjauan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2018). Pengukuran ekonomis dapat mengetahui apakah biaya instansi terkait lebih besar daripada instansi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan selain itu keadaan ekonomis ini diperlukan untuk meninjau penggunaan sumber daya finansial organisasi sektor publik secara optimal. Organisasi sektor publik dapat dikatakan ekonomis apabila terdapat hasil *spending less* dalam satuan moneter sehingga pertimbangan ekonomis ini cenderung bertumpu pada besaran input yang digunakan.

Kemudian dilihat dari indikator efisiensi yang berkaitan erat dengan produktivitas. *Dalam value for money* terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi alokasi yang berkaitan dengan kemampuan organisasi sektor public dalam mendayagunakan sumber daya input pada kapasitas optimal. Dilanjutkan dengan efisiensi teknis yang berkaitan dengan manajerial

berdasarkan pendayagunaan sumber daya input pada tingkat output tertentu, dengan demikian pengukuran dikatakan efisien apabila terdapat indikasi *spending well* atas sumber daya dan dana yang digunakan (Mardiasmo, 2018). Selanjutnya pengukuran efektivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil dari target kebijakan. Organisasi sektor publik dikatakan efektif apabila proses kegiatan telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), sehingga dalam hal ini efektivitas melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Konsep yang ditawarkan oleh *Value for Money* pun turut mendukung agenda Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi komponen penting dalam pengawasan anggaran pemerintah. Pengawasan melalui pengukuran kinerja ini menilai organisasi sektor publik tidak hanya pada tinjauan aspek keuangan melainkan juga pada aspek non keuangan dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik.

Melalui berbagai kondisi empiris yang telah diuraikan, maka pengukuran kinerja yang lebih kompleks pada program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang menjadi penting dilakukan mengingat perwujudan kota yang berkelanjutan salah satunya ditentukan oleh perencanaan tata ruang dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang berdasarkan tinjauan *Value for Money* dari sisi ekonomi, efisiensi, dan

efektifitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam menyesuaikan dan memperbarui program yang telah berjalan apabila diperlukan agar didapatkan hasil yang sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Mengacu pada Creswell (2016), studi kasus memungkinkan peneliti dalam mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu fenomena empiris dengan berbagai prosedur pengumpulan data dengan rentang waktu tahun 2020. Melalui studi kasus ini penelitian mengarah pada analisis program infrastruktur Kota Malang dengan tinjauan *value for money*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder yaitu dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tahun 2020 dan dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 serta penelitian terdahulu yang relevan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menurut Creswell (2016) adalah sebagai berikut : (1) pengumpulan dan pencarian data melalui dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tahun 2020 dan dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, (2) interpretasi langsung oleh peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya, (3) kemudian dibentuk pola yaitu infrastruktur, tata ruang dan sarana prasarana yang dijadikan pendalaman kasus pada Kota Malang, (4) generalisasi dari berbagai aspek

ekonomis, efisiensi dan efektifitas yang selanjutnya dibandingkan dan dibedakan dengan penelitian terdahulu yang relevan, (5) menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *value for money* (Purwiyanti, 2017; Mardiasmo, 2004). Berikut teknik analisis data pada masing-masing elemen:

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan (Harindra, 2019), input value dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input :Dana realisasi dokumen LKjIP DPUPRPKP Kota Malang
 Input value :Dana anggaran dokumen LKjIP DPUPRPKP Kota Malang

Program DPUPRPKP Kota Malang dikatakan ekonomis apabila input lebih kecil dari pada Input value, artinya bahwa dana realisasi yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan dengan kata lain kegiatan tersebut dapat menghemat atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan tidak ada pemborosan. Selanjutnya kriteria ekonomi meliputi: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis; Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomi seimbang; Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi menghasilkan pencapaian output yang maksimal dengan penggunaan input yang rendah, secara

matematis, rumus efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Hasil yang dicapai

Input : Dana realisasi yang digunakan

Program DPUPRPKP Kota Malang dikatakan efisien apabila output lebih besar dari pada Input, artinya bahwa dengan dana realisasi yang disediakan bisa menghasilkan output yang lebih besar atau dengan kata lain suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Kriteria efisiensi meliputi : Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efisien; Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisiensi seimbang; Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efisien.

3. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Tujuan atau target yang hendak dicapai

Output : Hasil yang dicapai

Program DPUPRPKP Kota Malang dikatakan efektif apabila output lebih besar dari pada outcome, artinya bahwa

hasil yang dicapai bisa melebihi dari tujuan atau target yang hendak dicapai. Kriteria efektivitas meliputi: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif; Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang; Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat sepuluh program yang menjadi fokus dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana Kota Malang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang (DPUPRPKP). Adapun angka pada keseluruhan program tersebut merupakan hasil dari kinerja Dinas terkait yang telah diolah berdasarkan dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2020 yang kemudian disesuaikan dengan dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Rasio Ekonomis

Ekonomi sebagaimana dalam kaitannya dengan penganggaran merujuk pada sejauh mana lembaga pemerintah atau lembaga sektor publik mengurangi sumber daya pembiayaan melalui pengurangan biaya yang tidak diperlukan (Mardiasmo, 2018; Rumagit et al, 2022). Selanjutnya hasil perhitungan rasio ekonomis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam menjawab permasalahan yang ada melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rasio Ekonomis Dinas PUPRPKP Kota Malang Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Perbaikan panjang jaringan jalan	116.471.161.693	86.246.760.550	74 %	Ekonomis
2	Perbaikan jembatan kota	65.067.459.702	63.011.198.900	96,8 %	Ekonomis
3	Peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	426.800.400	426.800.400	100 %	Ekonomi Seimbang
4	Fasilitas penerangan jalan	42.010.374.000	37.449.141.270	89 %	Ekonomis
5	Perbaikan irigasi kota	600.472.000	595.582.000	99,1 %	Ekonomis
6	Peningkatan rumah tinggal berakses air bersih	3.433.879.950	3.373.757.800	98,2 %	Ekonomis
7	Layanan rumah layak huni	11.448.523.607	10.719.154.755	93,6 %	Ekonomis
8	Pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL	2.368.792.000	2.203.594.450	93 %	Ekonomis
9	Pemanfaatan SIPR dalam tata ruang	481.879.000	397.105.000	82,4 %	Ekonomis
10	Perbaikan sarana dan prasarana publik	2.475.360.000	1.923.618.939	77,7 %	Ekonomis
	Total	244.784.702.352	206.346.714.064	84,29 %	Ekonomis

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, maka dapat dilihat jika secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP menunjukkan nilai ekonomis, Mardiasmo (2018), menegaskan bahwa jika diperoleh hasil dibawah 100% pada pengukuran ekonomis *Value for Money* maka kinerja tersebut dinilai ekonomis. Dengan demikian jika hasil yang terdapat pada Tabel 1 dan dikaitkan dengan kriteria pengukuran ekonomi dari Mardiasmo (2018) dan Rumagit et al (2022), maka Dinas PUPRPKP Kota Malang mendapatkan nilai ekonomis pada setiap program yang dijalankan dan pada keseluruhan program kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPRPKP Kota Malang pada tahun 2020 telah melakukan penghematan pada anggaran dan realisasi anggaran masing-masing program yang telah dilaksanakan. Senada dengan hal tersebut Kurrohmaan (2013),

menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis *Value for Money*. Mendukung hasil penelitian ini studi Kurniawati & Adhivinna (2016), menilai bahwa Pemerintah Kota Bantul menunjukkan rasio ekonomi yang ekonomis sehingga muncul tuntutan pemerintah yang transparan, bersih, ekonomis, responsif dan akuntabel.

Namun kondisi ekonomi seimbang pada program peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki belum sepenuhnya menerapkan *spending less* secara optimal. Kondisi ini tidak serta merta dapat langsung diartikan bahwa program tersebut menjadi faktor ketidaktercapaian indikator indeks infrastruktur pada gambar 1, namun kondisi ini lebih mengarah pada anggaran yang terserap habis pada dana yang dianggarkan dengan realisasi program tersebut. Hal tersebut bersifat

wajar dan tidak terlihat adanya pemborosan anggaran atas ketidakproduktifan sumber daya finansial.

Rasio Efisiensi

Efisiensi merujuk pada penggunaan input seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Dalam Harindra (2015), suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efisien

apabila hasil kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Hasil perhitungan rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam menjawab permasalahan yang ada melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Rasio Efisiensi Dinas PUPRPKP Kota Malang Tahun 2020

No	Program	Input	Output	Efisiensi	Keterangan
1	Perbaikan panjang jaringan jalan	74 %	102,05 %	137,91 %	Efisien
2	Perbaikan jembatan kota	96,8 %	93,83 %	96,31 %	Tidak Efisien
3	Peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	100 %	110,54 %	110,54 %	Efisien
4	Fasilitas penerangan jalan	89 %	98,73 %	110,93 %	Efisien
5	Perbaikan irigasi kota	99,1 %	87,98 %	112,60 %	Efisien
6	Peningkatan rumah tinggal berakses air bersih	98,2 %	103,41 %	105,31 %	Efisien
7	Layanan rumah layak huni	93,6 %	179,83 %	192,13 %	Efisien
8	Pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL	93 %	54,82 %	58,95 %	Tidak Efisien
9	Pemanfaatan SIPR dalam tata ruang	82,4 %	100 %	121,36 %	Efisien
10	Perbaikan sarana dan prasarana publik	77,7 %	75,47 %	97,13 %	Tidak Efisien
	Total	90 %	51,35 %	56,82 %	Tidak Efisien

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

Sebagaimana pada Tabel 2 maka dapat diketahui bahwa terdapat program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang tahun 2020 yang masuk dalam indikator efisien. Jika mengacu pada Mardiasmo (2018), maka 3 program yang meliputi program perbaikan jembatan kota, pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL, dan perbaikan sarana prasarana publik kurang dari 100%. Dengan demikian kriteria pengukuran efisiensi jika dikaitkan dengan Mardiasmo (2018), maka terdapat 3 program yang dikategorikan tidak efisien,

ketidakefisienan tersebut terjadi akibat adanya covid-19 yang dimungkinkan terjadi refocussing anggaran sehingga beberapa program harus tetap dilaksanakan dengan minimnya anggaran. Ketidakefektifan ini pada 3 program yang telah berjalan ternyata mempengaruhi kinerja keseluruhan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, sehingga disinyalir indikator ini yang mempengaruhi indeks ketercapaian infrastruktur pada poin tidak tercapai dan cukup tercapai.

Apabila mengacu pada Mardiasmo (2018) dan Harnindra (2019), perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan menurunkan input pada tingkat output yang sama, meningkatkan input dan output yang sama, dan meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Selain itu tetap diperlukan evaluasi dan peningkatan kinerja program yang kurang efisien guna mendapatkan hasil yang maksimal di beberapa tahun mendatang.

Selain itu ketujuh program yang memperoleh capaian diatas 100% dapat dikategorikan efisien, adapun diantaranya meliputi program perbaikan panjang jaringan jalan sebesar 137,91%, peningkatan jalan yang memiliki jalur jembatan kaki sebesar 110,54%, fasilitas penerangan jalan sebesar 110,93%, perbaikan irigasi kota sebesar 112,60%, peningkatan rumah tinggal berakses air bersih dengan capaian 105,31%, layanan rumah layak huni sebesar 192,13%, dan program pemanfaatan SIPR dalam tata ruang

sebesar 121,36%. Capaian efisiensi ini menjadi faktor dominan dalam *value for money*, sebagaimana dalam Muchlisin (2020), yang menyatakan bahwa efisiensi sebagai hal penting dalam *value for money* dibandingkan ekonomi dan efektivitas karena mengukur antara output dan input.

Rasio Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menentukan sebanyak apa biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Namun Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa efektivitas hanya mementingkan apakah organisasi sektor publik sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Selanjutnya hasil perhitungan rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam menjawab permasalahan yang ada melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Dinas PUPRKP Kota Malang Tahun 2020

No	Program	Outcome	Output	Efektivitas	Keterangan
1	Perbaikan panjang jaringan jalan	91,18 %	102,05 %	89,35%	Tidak Efektif
2	Perbaikan jembatan kota	96,09 %	93,83 %	102,41%	Efektif
3	Peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	89,93 %	110,54 %	81,36%	Tidak Efektif
4	Fasilitas penerangan jalan	56,31 %	98,73 %	57,03%	Tidak Efektif
5	Perbaikan irigasi kota	100 %	87,98 %	113,60%	Efektif
6	Peningkatan rumah tinggal berakses air bersih	90,21 %	103,41 %	87,24%	Tidak Efektif
7	Layanan rumah layak huni	55 %	179,83 %	30,58%	Tidak Efektif
8	Pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL	50%	54,82 %	91,21%	Tidak Efektif
9	Pemanfaatan SIPR dalam tata ruang	70%	100 %	70,00%	Tidak Efektif
10	Perbaikan sarana dan prasarana publik	100 %	75,47 %	132,50%	Efektif
	Total	79,87%	51,35 %	155,54%	Efektif

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

Sebagaimana pada Tabel 3 maka dapat diketahui bahwa terdapat program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPRKP Kota Malang tahun 2020 yang masuk dalam indikator efisien. Jika mengacu pada Mardiasmo (2018) jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif, terlihat sebagaimana dalam tabel 3 bahwa perbaikan jembatan kota, perbaikan irigasi kota, dan perbaikan sarana prasarana kota memiliki nilai secara berturut-turut 102,41%, 113,60% dan 132,50%.

Sementara itu ketujuh program lainnya mendapatkan hasil kurang dari 100% yang dikategorikan tidak efektif. Adapun ketujuh program tersebut diantaranya perbaikan panjang jaringan jalan dengan capaian 89,35%, peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki dengan capaian 81,36%, fasilitas penerangan jalan sebesar 57,03%, peningkatan rumah tinggal berakses air bersih sebesar 87,24%, layanan rumah layak huni dengan capaian 30,58%, pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL sebesar 91,21%

dan program pemanfaatan SIPR dalam tata ruang sebesar 70%.

Ketidakefektifan muncul akibat realisasi hasil yang telah dicapai dapat memenuhi target yang diharapkan namun tidak dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ketidakefektifan layanan rumah layak huni mendukung kajian Tusya'dah (2017) dan Sakdiah & Rahmawati (2020) yang mengemukakan bahwa Kota Malang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh atau tidak layak huni pada 29 titik. Walaupun demikian berdasarkan hasil yang ada pada Tabel 3 dan dikaitkan pada kriteria kinerja pengukuran efektivitas maka diperoleh hasil bahwa kinerja pada keseluruhan program tersebut dapat dikategorikan efektif. Dengan demikian untuk memperjelas kondisi masing-masing program atau kesepuluh program dengan menggunakan ketiga indikator ekonomis, efisiensi dan efektivitas tersebut disatukan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi indikator Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas

No	Program	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
1	Perbaikan panjang jaringan jalan	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
2	Perbaikan jembatan kota	Ekonomis	Tidak Efisien	Efektif
3	Peningkatan jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
4	Fasilitas penerangan jalan	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
5	Perbaikan irigasi kota	Ekonomis	Efisien	Efektif
6	Peningkatan rumah tinggal berakses air bersih	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
7	Layanan rumah layak huni	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
8	Pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL	Ekonomis	Tidak Efisien	Tidak Efektif
9	Pemanfaatan SIPR dalam tata ruang	Ekonomis	Efisien	Tidak Efektif
10	Perbaikan sarana dan prasarana publik	Ekonomis	Tidak Efisien	Efektif
	Keterangan	Ekonomis	Tidak Efisien	Efektif

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan pada tabel 4 terlihat dengan jelas bahwa hanya terdapat satu program dari Dinas PUPRPKP Kota Malang yang memenuhi indikator keseluruhan *value for money*, yaitu pada program perbaikan irigasi kota yang mencapai kategori ekonomis, efisien dan efektif pada masing-masing indikator pengukuran, hal ini mengindikasikan bahwa dari keseluruhan program yang tidak efektif dan tidak efisien pada dua indikator sebagaimana data pada tabel 4 mempengaruhi capaian indeks infrastruktur pada dokumen LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tahun 2020.

Sedangkan pada indikator tidak efektif dan tidak efisien memunculkan program pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL yang dikategorikan tidak efektif dan tidak efisien, menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan rencana tindak lanjut oleh dinas terkait, RBTL sebagaimana dimaksud dalam hal ini mengacu pada pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang memenuhi aspek kelestarian lingkungan sehingga mendukung program pembangunan berkelanjutan Kota Malang. Selain itu ketidakefektifan ini juga berimplikasi pada tidak meningkatnya kualitas hidup masyarakat dari adanya perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik terbuka sebagaimana dalam Aguswin (2018) yang menyatakan bahwa program RBTL yang efektif akan menunjang lingkungan yang tertata, berkualitas serta menambah vitalitas sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam perspektif Value for Money yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil pengukuran kinerja dari sisi ekonomis menunjukkan bahwa keseluruhan program pada DPUPRPKP Kota Malang tahun 2020 menunjukkan hasil yang ekonomis, yang ditandai dengan terlaksananya penghematan pada masing-masing program; (2) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efisiensi menunjukkan hasil yang efisien, walaupun terdapat 3 program yang meliputi program perbaikan jembatan kota, pembangunan kawasan prioritas sesuai RBTL, dan perbaikan sarana prasarana publik yang tingkat outputnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi Dinas PUPRPKP Kota Malang untuk mencapai tingkat efisiensinya, sehingga secara keseluruhan setiap kegiatan pada dinas terkait di tahun 2020 telah dilaksanakan secara efisien dan mampu menjalankan kegiatannya secara optimal; (3) Hasil pengukuran kinerja yang ditinjau dari sisi efektifitas menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat 3 indikator capaian hasil yang dapat dikatakan efektif, yangmana menjadi menarik ketika dilakukan pengukuran namun ketujuh program tidak mencapai sasaran efektivitas, hal ini menunjukkan bahwa indikator hasil yang diharapkan berjalan tidak sesuai dengan indikator hasil yang diharapkan oleh instansi

Oleh karena itu secara keseluruhan pengawasan sangat perlu diterapkan untuk mencapai *Value for Money* yang optimal. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu meningkatkan indikator output (keluaran), dimana aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dijadikan dasar pelaksanaan penyusunan anggaran, agar segala kebijakan atau program yang telah dibuat pemerintah selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga

melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam menyesuaikan dan memperbarui program yang telah berjalan apabila diperlukan agar didapatkan hasil yang sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan terutama dari sisi efisiensi dan efektifitas. Secara lebih lanjut penelitian ini masih memiliki kekurangan bahwasanya diperlukan pengujian dengan model lain atau variabel lain yang bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya sehingga hasil penelitian dapat memberi gambaran yang lebih baik.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka beberapa masukan berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan :

1. Memperbaiki program kinerja untuk tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada masing-masing program yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan, outcome dan sasaran yang diharapkan
2. Diharapkan dapat memperhatikan kembali kinerja secara keseluruhan pada Dinas PUPRKP Kota Malang tahun 2020 sehingga setiap program dapat menghasilkan output yang lebih maksimal
3. Untuk Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan pengujian menggunakan model lain seperti akuntabilitas, transparansi atau variabel lain dari *Value for Money* untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*,

- 6(1), 108-117. Retrieved from <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Aguswin, A. (2018). Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. *ATAP Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 6(1).
- Budihardjo, E. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. 2020. *LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)*. Malang: DPUPRKP
- Harindra, I. (2019). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(2).
- Kristantyo, C., Sebayang, N., Ma, & ruf, A. (2018). Studi Evaluasi Prasarana Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan Sekitar Kampus di Kota Malang. *Institut Teknologi Nasional Malang*.
- Lestari, M. (2015, Februari 12). *Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan (Studi Kasus Proyek Jembatan Kedungkandang, Kota Malang*. Retrieved 07 05, 2022, from Repository [ub: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/143211](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/143211)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muchlisin, R. (2022, July 28). *Value for Money (Pengertian, Manfaat, Indikator dan Pengukuran)*. Retrieved from [Kajian Pustaka: https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html](https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html)

- Pemerintah Kota Malang. 2020. *RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)*. Malang
- Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 6(3), 467-476.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi. *e Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200.
- Rezky, A. M. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rumagit, I. B., Karamoy, H., & Afandi, D. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13-22.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2020). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Teknik ITS*, 9(1), 223-240.
- Tarigan, R. (2015). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tusya'dah, K. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kualitas Pemukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang*. Malang: Institut Teknologi Nasional .
- Wandari, L. T. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Interna terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Bali: Fakultas Ekonomi.
- Wiguna, S., Yuniartha, G., & Surya, D. N. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).

[Halaman Kosong]